

ABSTRAK

Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Jadi, Pekerja Migran Indonesia meliputi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum, Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga, dan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan. Banyaknya pekerja migran di Indonesia menimbulkan berbagai macam permasalahan, salah satunya adalah perdagangan manusia. Permasalahan perdagangan manusia menjadi masalah serius terutama bagi pekerja migran mengingat menurut laporan tahunan Departemen Luar Negeri Amerika tentang perdagangan manusia (Trafficking in person) Indonesia berada di Tier 2 dalam penanganannya terhadap perdagangan manusia. Penelitian ini mengkaji secara khusus mengenai tanggung jawab pemerintah Jawa Timur terhadap perlindungan pekerja migran dan apakah kebijakan peraturan di Jawa timur telah mampu memberikan perlindungannya bagi pekerja migran dalam Tindakan perdagangan manusia. Diambil daerah Jawa Timur karena merupakan daerah penghasil pekerja migran terbanyak di Indonesia.

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) yang menjadi alasan agar dapat memahami secara konseptual mengenai konsep-konsep tanggung jawab Perlindungan Pekerja Migran terhadap tindakan perdagangan manusia Provinsi Jawa Timur serta keefektifan kebijakannya serta analisis dari regulasi terkait. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier. Data ini kemudian dianalisis dengan metode analisis deksriptif analisis.

Hasil penelitian ini adalah Pemerintah provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaannya telah melakukan sesuai dengan peraturan dan undang-undang. Pelaksanaan tersebut telah sesuai dengan undang-undang No. 18 tahun 2017 yang tertera pada pasal 40. Upaya perlindungan dilakukan secara preventif dan represif. Kebijakan peraturan daerah dan peraturan gubernur telah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur. Namun, pelaksanaan tersebut kurang merata sehingga faktanya masih banyak kasus pekerja migran, meskipun terwujud dalam penanganannya, masih dirasa kurang maksimal dikarenakan menjadi tanggung jawab dari pihak PMI maupun pemerintah dan stake holder terkait

Kata kunci: Perlindungan PMI, perdagangan manusia, Jawa Timur

ABSTRACT

Indonesian Migrant Worker is any Indonesian citizen who will, is, or has done work with wages outside the territory of the Republic of Indonesia. So Indonesian Migrant Workers include Indonesian Migrant Workers who work for legal entity employers, Indonesian Migrant Workers who work for individual or household employers, and seafarers who are ship crews and fishery seafarers. The large number of migrant workers in Indonesia causes various kinds of problems, one of which is human trafficking. The problem of human trafficking is a serious problem, especially for migrant workers, considering that according to the U.S. State Department's annual report on human trafficking (Trafficking in person), Indonesia is in Tier 2 in its handling of human trafficking. This study examines specifically the responsibility of the East Java government for the protection of migrant workers and whether regulatory policies in East Java have been able to provide protection for migrant workers in the Act of trafficking. East Java is taken because it is the largest producer of migrant workers in Indonesia.

This type of research in legal research is normative research with a conceptual approach and statue approach which is the reason for being able to understand conceptually the concepts of responsibility for the Protection of Migrant Workers against human trafficking in East Java Province and the effectiveness of its policies. The data used comes from legal materials, both primary, secondary and tertiary. This data is then analyzed using the descriptive analysis method. And analisis the regulation about the legal issues

The result of this research are that the East Java provincial government has carried out its implementation is in accordance with Law Nomer 8 of 2017 as stated in article 40. Protection efforts are carried out in a preventive and repressive manner. Regional regulatory policies and governor regulations is not evenly distributed, so in fact there are still many cases of migrant workers, even thought, the handling is realized, it is still felt to be less than optimal because it is the responsibility of PMI as well as the government and stakeholders.

Keywords: PMI protection, human trafficking, East Java